

Diduga Gelapkan Bansos Rp2,4 T

Terbesar Kemendiknas, Menyusul Kemenpora

JAKARTA—Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2010 di delapan kementerian. Nilai totalnya terbilang fantastis, yakni Rp2,435 triliun. Data tersebut diangkat FITRA berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011.

"KPK harus segera melakukan penyelidikan," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi di Jakarta,

kemarin (21/6). Dia menjelaskan anggaran bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial terhadap dirinya."Dalam laporan BPK disebut sejumlah kementerian yang anggaran bansosnya tidak mengalir atau penyalurannya tidak sesuai peruntukan," ujar Uchok.

Dugaan penyimpangan paling besar terjadi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yakni mencapai Rp1,49 triliun. Rinciannya adalah penyaluran tidak ada atau tidak lengkap laporan pertanggungjawaban keuangannya sebesar Rp1,425 triliun, dana tidak disalurkan atau mengendap di pihak ketiga sebesar Rp69,33 miliar, dan penyaluran yang ti-

tidak sesuai peruntukan sejumlah Rp438,67 juta.

Penyimpangan nomor dua terbesar ditemukan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang dinahkodai Andi Mallarangeng. Dananya mencapai Rp407,8 miliar. "Pantas saja pemuda dan olah raga kita tidak maju-maju dibandingkan negara lain. Soalnya anggaran bansos diduga terjadi penyimpangan dalam penyalurannya," sindir Uchok.

Berturut-turut dugaan penyimpangan dana bansos lain adalah

Kementerian Sosial sebesar Rp236,510 miliar, Kementerian Kesehatan Rp141,916 miliar, Ke-

Rp14,280 miliar, serta Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Rp4,328 miliar.

"Kami tidak habis heran, bagaimana bisa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dengan sengaja dan begitu teganya tidak menyalurkan secara benar anggaran bansos itu," kata Uchok.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp93,885 miliar itu sengaja hanya disimpan atau mengendap pada pihak ketiga, seperti bank, kelompok masyarakat, atau koperasi. "Kementerian yang dipimpin Helmy Faishal Zaini itu harus

segera mengembalikan anggaran bansos yang tidak disalurkan tersebut bersama dengan bunganya," ujarnya. (pri)

DANA BANSOS TAHUN 2010 DIDUGA DISELEWENGGAN

1. Kementerian Pendidikan Nasional	Rp1,49 triliun
2. Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Rp407,8 miliar
3. Kementerian Sosial	Rp236,510 miliar
4. Kementerian Kesehatan	Rp141,916 miliar
5. Kementerian PDT	Rp93,885 miliar
6. Kementerian Agama	Rp41,391 miliar
7. Kementerian Pertanian	Rp14,280 miliar
8. Kementerian Budpar	Rp4,328 miliar
Total	Rp 2,435 triliun

Sumber : FITRA berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011

GRAFIS : BLACK/PONTIANAKPOST

menterian Pembangunan Daerah Tertinggal Rp93,885 miliar, Kementerian Agama Rp41,391 miliar, Kementerian Pertanian